



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Menko PMK : “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Adalah Salah Satu Modal
Utama Perbaikan Masalah Sosial Demi Wujudkan Indonesia Hebat”**

Jakarta (18/01) - Bertempat di kantor Wantimpres, Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, hari ini menjadi narasumber dalam pertemuan terbatas membahas Revitalisasi dan Revalidasi *Civic Education*. Dalam sambutannya, Menko PMK menegaskan bahwa kondisi peringkat daya saing Republik Indonesia (RI) saat ini mengalami penurunan. World Economic Forum (WEF) merilis Indeks Daya Saing atau *Competitiveness Index* negara-negara dunia. Tahun ini, Indonesia berada di peringkat ke-41, turun dari posisi terakhir yang sebelumnya di posisi ke-37.

Faktor yang memicu daya saing Indonesia turun menurut The Global Competitiveness Report 2016-2017, World Economic Forum adalah : Korupsi yang menempati posisi tertinggi; inefisiensi birokrasi Pemerintah; Infrastruktur yang terbatas; Akses ke pendanaan: inflasi; Ketidakstabilan kebijakan; Buruknya etos kerja buruh; Tingkat pajak; Tenaga kerja pintar yang terbatas; Kebijakan pajak; Regulasi valas; Ketidakstabilan pemerintah; Buruknya kesehatan publik; Kejahatan dan pencurian; Inovasi yang terbatas; dan Peraturan buruh yang ketat.

Beberapa indikator menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan masih belum berdampak terhadap kehidupan sosial sehari-hari seperti masih maraknya korupsi, pungli, kekerasan di masyarakat, tawuran antar warga/siswa/mahasiswa, *bullying*, kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional, disiplin yang rendah, dan kurangnya keteladanan.

“Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah salah satu modal utama perbaikan berbagai masalah sosial untuk wujudkan Indonesia yang lebih baik dan hebat”, tegas Menko PMK Puan Maharani mencermati maraknya berbagai fenomena sosial di Indonesia.

Menko PMK menyampaikan bahwa karakteristik *civic education* di Indonesia mengacu pada kurikulum 2013, yakni : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang terangkai dalam Pancasila dengan 3 pilar lainnya : UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Menko PMK melanjutkan bahwa perlu pemantapan pendidikan pancasila melalui 3 jalur kurikuler diantaranya intra-kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler. Metode peningkatan pemahaman Pancasila perlu dimuat secara eksplisit maupun implisit dalam kurikulum pendidikan. Pelaksanaan berbagai kegiatan melalui 3 jalur kurikuler, seperti outbound, kegiatan kreatif seni dan budaya, peringatan hari besar keagamaan, dll diharapkan mampu meningkatkan pemahaman nilai-nilai Pancasila.

“internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada siswa/generasi muda hendaknya dapat dilakukan dengan menarik, ringan, dan mudah. Gunakan metode-metode modern yang sesuai dengan perkembangan jaman, namun tetap memegang teguh nilai budaya dan adat istiadat bangsa.

Perbanyak kegiatan-kegiatan siswa/remaja/pemuda/mahasiswa yang terangkum dalam 3 kegiatan kurikuler sehingga menstimulasi daya nalar dan emosi untuk semakin memahami, memaknai, dan menjalankan nilai-nilai luhur Pancasila”, pungkas Menko PMK Puan Maharani.

Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter @kemenkopmk
021 3459444 ext 225